

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (STUDI PUTUSAN MK
NOMOR 92/PUU-X/2012)**

SKRIPSI

Oleh

Farhan Kamaluddin

NIM. 05010421008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Kamaluddin
NIM : 05010421008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penguatan
Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi
Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



Farhan Kamaluddin

NIM. 05010421008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Kamaluddin

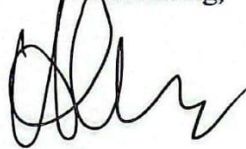
NIM : 05010421008

Judul : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 30 April 2025

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M. Si

NIP.197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Kamaluddin

NIM. : 05010421008

Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan MK Nomor 92/PUU-
X/2012)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



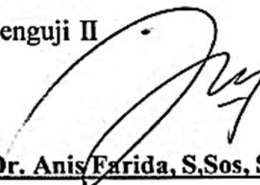
H. Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M. Si
NIP. 197809202009011009

Penguji III



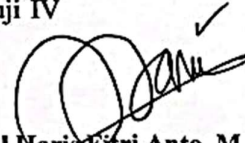
Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 15 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. M. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farhan Kamaluddin
NIM : 05010421008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : 05010421008@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGUATAN FUNGSI
LEGISLASI DEWANPERWAKILAN DAERAH (STUDI PUTUSAN MKNOMOR 92 /PUU-
X/2012)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Agustus 2025

Penas

(Farhan Kamaluddin)



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012, ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu ilmu ketatanegaraan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sebagai wakil daerah di tingkat nasional, DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam pembentukan undang-undang. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa DPD memiliki posisi yang sejajar dalam proses legislasi pada bidang-bidang tertentu, meskipun kewenangannya belum mencakup tahap pengambilan keputusan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPD; (2) mengkaji relevansi penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif *siyasah dusturiyah*; serta (3) mengevaluasi sejauh mana penguatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan musyawarah dalam tata kelola pemerintahan yang islami.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dalam konteks penguatan kewenangan lembaga perwakilan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menguatkan fungsi DPD dalam tahapan pembentukan undang-undang, terutama dalam memberikan pendapat, ikut membahas, dan menyampaikan usulan pada materi tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penguatan fungsi ini sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah), keadilan (*'adalah*), dan *amanah*, di mana setiap elemen masyarakat, termasuk perwakilan daerah, memiliki hak dan peran dalam pengambilan kebijakan publik.

Meskipun terdapat penguatan secara normatif, implementasi kewenangan legislasi DPD masih menghadapi tantangan struktural dan politik, seperti dominasi DPR dalam proses legislasi dan belum optimalnya pengakuan terhadap usulan DPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penataan mekanisme legislasi yang lebih inklusif agar penguatan fungsi legislasi DPD tidak berhenti pada tataran putusan hukum, melainkan juga terealisasi secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Tujuan Penelitian	21
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	21
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II Tinjauan Umum Tentang <i>Siyasah Dusturiyah</i> dan Pengertian Konsep Lembaga Negara.....	28
A. Pengertian <i>Fiqih Syasiyah</i>	28
1. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i>	30
2. Pengertian dan Lingkup <i>Siyasah Dusturiah</i>	35
3. Cabang Kekuasaan Negara Dalam Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	39
4. <i>Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd</i>	41
5. Wewenang <i>Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd</i>	44
B. Fungsi dan Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan.....	46
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	47
D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	50
E. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>)	52
F. Teori Lembaga Negara	55

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

BAB III Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 58

- A. Pengujian konstiusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 58
- B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Terhadap Ketatanegaraan Indonesia 63
- C. Dinamika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 68
- D. Limitasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang..... 76
- E. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah 80

BAB IV Tinjauan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Melalui *Siyasah Dysturiyah* 85

- A. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..... 85
- B. Analisis *Fiqh Siyasah Dysturiyah* Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah..... 87

BAB V Penutup 97

- Kesimpulan 97
- Saran..... 98

Daftar Pustaka 100

LAMPIRAN 103

- Surat Ketersediaan Sebagai Dosen Pembimbing 103
- Pengajuan Judul..... 104
- Pengesahan Proposal 105
- kartu bimbingan..... 106
- Transkip..... 107
- Kartu Tanda Mahasiswa..... 108
- Kartu Rencana Studi..... 109
- Hasil Turnitin 110
- Biodata Penulis 111

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Islamic studies di perguruan tinggi: pendekatan integratif-interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: teori dan Praktik Penyusunan Perundang-undangan*. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Cet. 2. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Indrayana, Denny. *Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2007, n.d.
- Moh Mahfud M. D. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Muhammad Husain Haekal and Ali Audah. *Umar Bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertubuhan Islam Dan Kedaulatannya Masa Itu*. Bogor, Indonesia: Litera AntarNusa, 2003.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islam*. Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah" (n.d.).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih siyasah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Sjadzali, Munawir. *Islam and governmental system: teachings, history, and reflections*. INIS materials series v. 11th. Jakarta: INIS, 1991.
- al-Zuhayli, Wahbah, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Risipalman, S.H., M.H., Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H., and Nora Aviza, S.H. *Kewenangan DPD RI Sebagai Lembaga Negara Legislatif*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- al-Zuhayli, Wahbah, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Sulardi. *Reformasi hukum: rekonstruksi kedaulatan rakyat dalam membangun demokrasi*. Cet. 1. Malang: In-Trans Pub., 2009.
- Ramadhan, F. *Dinamika Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2022
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Purwanto, M. R. *Reformasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.

Nawawi, K. H. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Situbondo: Penerbit Literasi Nusantara. 2020

Jurnal

Efriza, Efriza. "Refleksi Dalam Memaknai Eksistensi Rakyat; Antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Mpr." *Jurnal Renaissance* 3, no. 01 (May 1, 2018)

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–127.

Irawan, Dedy, M. Zaky Hidayatullah, dan Sabarudin Ahmad. "Pemikiran Politik Sunni, Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah." Makalah. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014.

Risnain, Muh. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Legislasi DPD RI Dikaitkan Dengan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang." *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 1–15.

Anjarsari, Ahmad Dodi dan Lulu. "Memperkuat Legislasi DPD." *Majalah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.

Rochmawanto, Munif. "Pembagian Kekuasaan Antara Mpr, Dpr, Dan Dpd Dalam Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berkedaulatan Rakyat." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (June 1, 2014): 1.

Setowara, Muhammad Subhan. "The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 2 (December 31, 2020). Accessed May 12, 2025. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14912>.

Toding, Adventus. "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 295.

Agung, Wasana, Rahmad Purwanto, dan M. Daeny. "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 2 (2023): 52–59.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

Skripsi

Al Jinan, Raihanah. *Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

Zaletti, Robby Akbar. *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Maghfiroh, Putri. *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014)*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Isbar, Moh. Usfi. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan DPD Sebagai Teritorial Representation Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut UU No. 17 Tahun 2014*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Roychan, Wahidur. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diucapkan pada 27 Maret 2013.
- Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. *Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Laporan Badan Legislasi Mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021*. Jakarta: DPR RI, 2021.